

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsar (2009 : 93) bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli antara lain :

Menurut Gugup Kismono (2001 : 364), Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.

Menurut Sofyan Assauri (2004 : 83) distribusi merupakan suatu lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

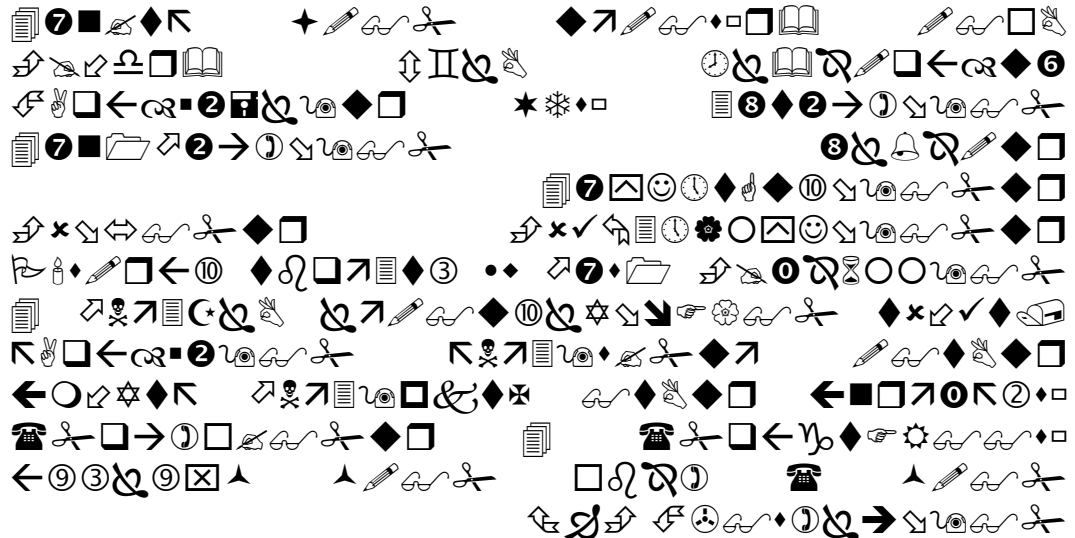
C. Glenn Walters dalam Angipora (2002 : 295), Distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.

Distribusi adalah kegiatan yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan semua bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi, kegiatan ini meliputi pengendalian produksi dan penanganan bahan dan penerimaan. (Charles A. Taff, 1998 : 87)

Sedangkan menurut Keegan (2003 : 136) distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari.

Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Menurut firman ALLAH SWT tentang distribusi sebagaimana terkandung dalam surat Al-hasyr : 7 yaitu :



Artinya :

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar hanya diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukum-Nya” (QS Al-hasyr : 7).

Sedangkan menurut Fandi Tjiptono (2002 : 73), distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai.

Ditinjau dari bagian-bagiannya, distribusi merupakan suatu sub sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang sesuai dengan tujuan tertentu. Sistem ini harus diawasi agar dapat berjalan sebagaimana

mestinya. Secara sederhana sistem ini juga merupakan seperangkat elemen yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu.

2.1.1. Fungsi Saluran Distribusi

Mengingat saluran distribusi merupakan suatu struktur yang menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda oleh berbagai macam lembaga usaha (seperti produsen, pedagang besar dan pengecer), maka kegiatan saluran distribusi harus dapat dipertimbangkan dan dilakukan secara efisien dan efektif.

Saladin (2000 : 121), mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan elemen penting dalam pemasaran yang merupakan salah satu proses pada perusahaan dalam penyetokan barang serta penawaran produk ke pasar.

Swastha (2003 : 61), menjelaskan bahwa fungsi saluran distribusi meliputi delapan hal sebagai berikut:

1. Menjembatani antara produsen dan konsumen.
2. Saluran distribusi memberikan fungsi-fungsi tambahan atas fungsi pemasaran, misalnya penjualan kredit.
3. Saluran distribusi ikut serta dalam penetapan harga.
4. Saluran distribusi aktif dalam promosi.
5. Melalui sarana distribusi konsumen dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan.
6. Saluran distribusi dapat menurunkan dana dan biaya.
7. Saluran distribusi sebagai komunikator antara produsen dan konsumen

8. Saluran distribusi memberi jaminan atas barang atau jasa kepada konsumen.
9. Saluran distribusi memberikan pelayanan tambahan kepada konsumen.

Dalam kegiatan distribusi suatu produk, kita juga mengenal istilah Distribusi fisik. Menurut Stanton, (2002 : 89) distribusi fisik adalah semua kegiatan yang dapat bertalian dengan memindahkan produk – produk yang tepat, dalam jumlah yang tepat ke tempat yang tepat pula.

Kegiatan distribusi fisik (*logistik pemasaran*) ini mempunyai beberapa tugas. Adapun beberapa tugas yang termasuk dalam kegiatan distribusi fisik tersebut diantaranya:

1. Perencanaan
2. Pengimplementasian, dan
3. Pengendalian arus material, barang jadi dan informasi yang berkaitan secara fisik dari tempat asalnya ke tempat konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara terperinci kegiatan-kegiatan yang ada pada distribusi fisik dapat dibagi dalam lima kelompok, yaitu :

1. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpanan
2. Penentuan sistem penanganan barang.
3. Penggunaan sistem pengawasan persediaan.
4. Penetapan prosedur untuk memproses pesanan
5. Pemilihan metode pengangkutan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa distribusi fisik merupakan aktifitas pendistribusian suatu produk yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tugas yang tercakup dalam pendistribusian fisik seperti perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian arus material yang ada dalam perusahaan sehingga barang yang akan didistribusikan dapat didistribusikan sesuai dengan alur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses penyalurannya.

2.1.2. Kebijakan Saluran Distribusi

Kebijakan saluran distribusi lembaga-lembaga yang digunakan perusahaan untuk membantu memasarkan produk kepada pembeli ini biasa disebut perantara. Dalam melakukan saluran distribusi, maka sebaiknya menetapkan tujuan dalam menggunakan saluran distribusi terlebih dahulu.

Warren J. Keegan (2001 : 23), menerangkan bahwa saluran distribusi sebagai organisasi jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang bersama-sama melakukan semua kegiatan yang diperlukan untuk menghubungkan produsen dengan pemakai untuk menyelesaikan tugas pemasaran.

Adapun menurut Philip Kotler (1999 : 98), yang menjadi tugas-tugas penting dan harus dijalankan oleh para anggota saluran distribusi adalah :

- a. Penelitian, mengumpulkan informasi-informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran.
- b. Promosi, pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasive mengenai penawaran.

- c. Kontrak, pencapaian dan menjalin hubungan dengan calon pembeli.
- d. Penyelaras, mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan pembeli
- e. Negosiasi, usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan perpindahan hak pemilik atau penguasaan bisa dilakukan.
- f. Distribusi fisik, transportasi dan penyimpanan barang.
- g. Pembiayaan, permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut.
- h. Pengambilan resiko, perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pekerjaan saluran distribusi.

2.1.3. Standar Pelayanan Distribusi

Standar pelayanan merupakan tujuan yang spesifik dan harus dapat diukur, yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan distribusi fisik mereka. Distribusi fisik diawali oleh suatu pertimbangan yaitu pemenuhan kebutuhan konsumen. (Gugup Kismono, 2001 : 364)

Menurut Moenir (2000 : 16), Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Kertajaya (2000 : 421), Pelayanan merupakan salah satu komponen nilai yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebab pada dasarnya hanya akan melakukan transaksi dengan perusahaan yang akan memberikan nilai terbaik baginya.

Dalam setiap transaksi distribusi, banyak produsen maupun konsumen selalu menghendaki adanya ketentuan kualitas dan jenis barang yang akan diperjualbelikan sehingga diperlukan pembakuan standar barang agar barang yang akan disalurkan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini standar pelayanan distribusi berisikan dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas dalam memberi pelayanan, pengawasan intern, penanganan pengaduan serta jaminan pelayanan distribusi.

2.2. Pengertian Raskin

Menurut Sutarto Alimoeso dalam Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (2012 : IV) raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster 1 yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini raskin mempunyai multi fungsi yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin , sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu raskin berdampak langsung stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Darlaini R. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Program Pendistribusian Beras Miskin Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Ketahanan Pangan (2009 : 14), menjelaskan bahwa Raskin

merupakan program yang diluncurkan pemerintah yang merupakan wujud komitmen pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Disamping itu, raskin juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin adalah :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang pangan.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
7. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Inpres No. 7 Tahun 2009, tentang Kebijakan Pemberasan.
9. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Berdasarkan peraturan daerah yang menjadi landasan dalam melakukan program distribusi raskin di atas maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang cukup besar dalam penyelenggaraan program distribusi raskin yang ada di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Keefektifan distribusi raskin dapat dinilai melalui indikator keberhasilan program raskin yaitu :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM).

2. Tepat Jumlah

Jumlah beras raskin yang merupakan hak rumah tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/RTS/bulan atau 180 Kg/RTS/tahun.

3. Tepat Harga

Harga tebus raskin adalah sebesar Rp 1600,00/Kg netto di titik distribusi.

4. Tepat waktu

Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana penyaluran.

5. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

6. Tepat Kualitas

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras bulog. (Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012)

2.3. Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan masalah terbesar dalam proses pembangunan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Menurut H. Rahardjo Adisasmito (2005 : 191), kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang dihadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun yang kurang maju, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya aksesnya kepada prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Menurut Subandi (2012 : 78), kemiskinan merupakan kondisi masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas

Menurut pandangan islam, kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Syarih juga telah menetapkan kebutuhan primer tersebut yaitu sandang, papan, pangan. Sebagaimana firman ALLAH SWT tentang kemiskinan yaitu :

“Berinfiaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS al-Baqarah : 273).

Menurut H. Rahardjo Adisasmito (2005 : 192), kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural (*strukturak poverty*) yang terjadi terus menerus, dan

kemiskinan sementara (*transient poverty*). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat yang diakibatkan oleh system modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi dan hanya bersifat sementara waktu saja.

2.3.1. Kriteria Kemiskinan

Menurut Rahardjo Adisasmita (2005 : 193), kriteria kemiskinan secara umum dapat dilihat dari tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori atau protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012, Pemerintah memiliki acuan yang mengidentifikasi keluarga miskin sampai kepada identitas kepala rumah tangga dengan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam kriteria rumah tangga masyarakat miskin yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal yaitu kurang dari 8 m² per orang.

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal yaitu tanah, bambu dan kayu murahan.
3. Jenis bangunan tempat tinggal yaitu bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plaster.
4. Fasilitas tempat buang air besar yaitu tidak punya atau bersama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga yaitu bukan listrik.
6. Sumber air minum yaitu sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan.
7. Bahan bakar memasak sehari-hari yaitu kayu bakar, arang, minyak tanah.
8. Konsumsi daging atau ayam atau susu per minggu yaitu tidak pernah atau satu kali seminggu.
9. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun yaitu tidak pernah membeli atau satu setel.
10. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga yaitu satu kali atau dua kali sehari.
11. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas atau Poliklinik yaitu tidak mampu berobat.
12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga yaitu buruh, atau tidak bekerja.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga yaitu tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.

14. Pemilikan asset atau harta yaitu tidak punya tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00.

Berdasarkan kriteria masyarakat rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk miskin dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu RTSM (rumah tangga sangat miskin), RTM (rumah tangga miskin), dan RTHM (rumah tangga hampir miskin). Berdasarkan penggolongan tersebut pemerintah mampu menentukan tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pada suatu daerah.

2.4. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanita Sari (2007), Mahasiswa Program Studi Agribisnis Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul tentang “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin.” Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa harga raskin yang diterima rumah tangga miskin berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Program pendistribusian raskin memberikan surplus kepada penerima manfaat beras miskin karena harga raskin yang berlaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah dari pada harga beras pada umumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamhari (2012), Mahasiswa Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul tentang “Efektifitas Distribusi Raskin Di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil

kesimpulan bahwa distribusi raskin di Indonesia belum tepat sasaran. Distribusi raskin di Indonesia belum tepat jumlah dan harga. Indeks ketepatan jumlah 58 persen di pedesaan, 63 persen di perkotaan dan 67 persen secara nasional.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Emalia (2012), Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung yang berjudul tentang “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung.” Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program raskin ditiga kecamatan di Kota Bandar Lampung tepat pada seluruh aspek penilaian, kecuali pada ketepatan jumlah, dikarenakan adanya pemberian penambahan raskin yang mulanya sebesar 13 Kg/RTM menjadi 15 Kg/RTM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rina Maryana (2011), Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang berjudul tentang “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kebayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.” Adapun hasil dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Informan Penelitian Program Raskin di Kelurahan Kebayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Implementasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diharapkan.

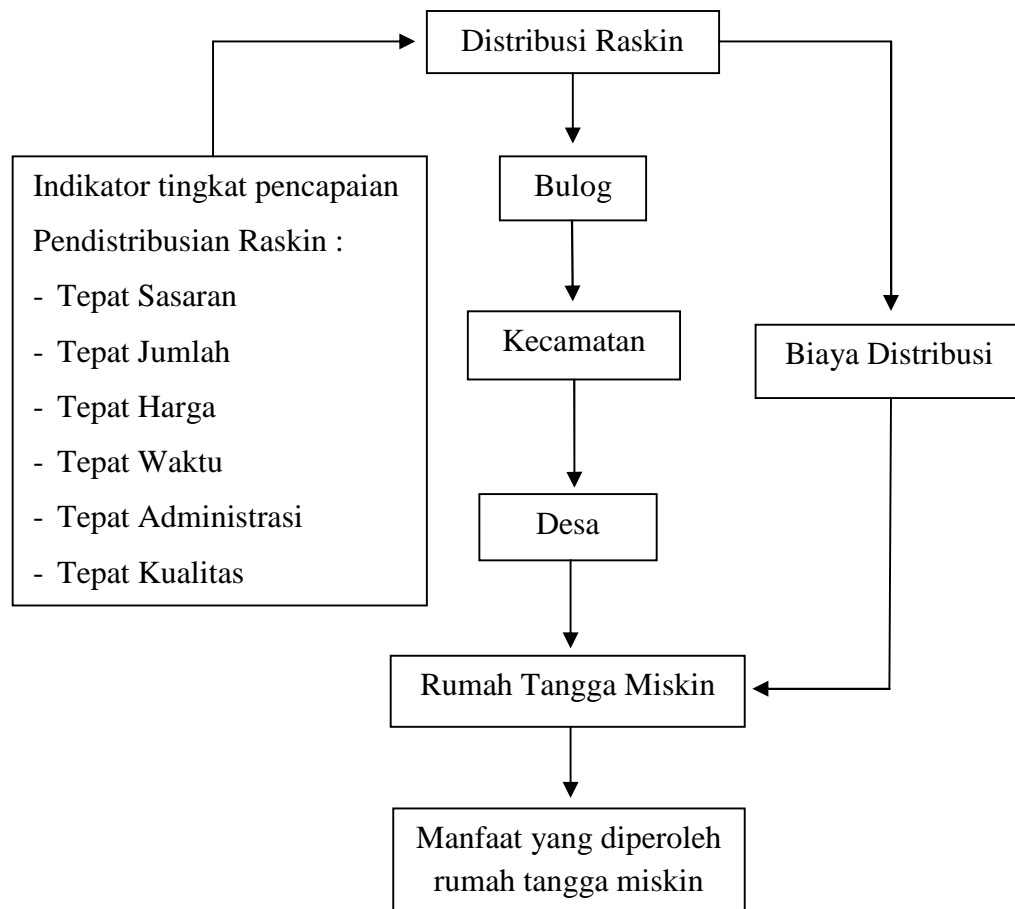
2.5. Kerangka Pemikiran

Beras untuk keluarga miskin atau yang sering disebut dengan istilah raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan agar mereka tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Distribusi raskin merupakan proses penyaluran beras kepada penduduk miskin yang telah terdata sebagai masyarakat yang berhak menerima raskin. Beras yang akan didistribusikan kemasing-masing titik distribusi berasal dari gudang penyimpanan bulog yang akan diangkut oleh satker raskin dan menyerahkan beras raskin tersebut kepada pelaksana distribusi ditingkat kelurahan atau desa di titik distribusi. Titik distribusi merupakan tempat atau lokasi penyerahan beras oleh satker raskin kepada pelaksana distribusi yaitu kepala desa atau lurah.

Pendistribusian raskin dianggap sudah efisien apabila mampu menyampaikan beras untuk keluarga miskin penerima manfaat dengan biaya distribusi yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tingkat efisiensi pemasaran dapat dihitung dengan perbandingan antara biaya distribusi atau pemasaran dengan nilai jual produk yang dipasarkan.

Berdasarkan uraian di atas, agar dapat dipahami dengan jelas mengenai uraian tersebut maka dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran.

2.1 : Skema Kerangka Pemikiran Program Distribusi Raskin.



Sumber : Perum Bulog Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012.

2.6. Indikator Program Distribusi Raskin

Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberi petunjuk atau keterangan sehingga proses pendistribusian raskin dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam

pedoman umum distribusi raskin serta diperkuat dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, adapun yang menjadi indikator dalam pelaksanaan Distribusi Beras Miskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator	Sub Indikator	Skala Liket
1	Tepat Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran penerima raskin 2. Kriteria penerima raskin 3. Pendistribusian yang tepat sasaran 4. Pemanfaatan raskin untuk kebutuhan sehari-hari 5. Pendistribusikan raskin secara rutin 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sangat Sesuai b. Sesuai c. Cukup Sesuai d. Kurang Sesuai e. Tidak Sesuai
2	Tepat Jumlah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah raskin 15 Kg/bulan 2. Jumlah beras yang sama tiap bulan 3. Ketetapan pemanfaatan jumlah raskin 4. Jumlah raskin yang diterima RTS/ bulan 5. Jumlah raskin 90 Kg/6 bulan 	
3	Tepat Harga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran harga raskin 2. Ketetapan harga raskin dari tahun 2010-2012 3. Ketentuan harga raskin 4. Harga raskin Rp 1600,00/Kg 5. Sistem pembayaran harga raskin 	
4	Tepat Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat pada waktu yang ditentukan 2. Jadwal pendistribusian yang jelas 3. Pendistribusian raskin 12 kali dalam setahun 4. Pendistribusian raskin dalam 	

		<p>kurun waktu 6 bulan sekali</p> <p>5. Raskin didistribusikan setiap bulan</p>	
5	Tepat Administrasi	<p>1. Persyaratan administrasi</p> <p>2. Perlengkapan administrasi raskin</p> <p>3. Kartu raskin</p> <p>4. Administrasi yang sesuai</p> <p>5. Prosedur administrasi</p>	
6	Tepat Kualitas	<p>1. Kualitas raskin</p> <p>2. Raskin layak dikonsumsi</p> <p>3. Ketetapan kualitas raskin</p> <p>4. Kualitas raskin setara dengan kualitas beras pada umumnya</p> <p>5. Pendistribusian raskin tepat kualitas</p>	